



**RISALAH RDPU KOMISI X DPR RI DENGAN
FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA (P1) JAWA BARAT
DAN FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA NEGERI & SWASTA
(FGPPNS) JAWA TENGAH**

Nama Rapat : RDPU Komisi X DPR RI dengan Forum Guru Prioritas Pertama (P1) Jawa Barat dan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri & Swasta (FGPPNS) Jawa Tengah

Tahun Sidang : 2023-2024

Masa Persidangan : V (Lima)

Rapat ke- : -

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024

Waktu : 14.41 sd. 16.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Gd. Nusantara I Lt. 1
Jln. Jend Gatot Subroto Senayan,
Jakarta

Ketua Rapat : Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol.

Sekretaris Rapat : Dadang Prayitna, S.IP., M.H.

Acara : 1. Penyampaian aspirasi terkait permasalahan pendidikan.
2. Lain-lain.

Hadir : **PIMPINAN :**

1. H. Syaiful Huda
2. Dr. Dede Yusuf ME., S.T., M.I.Pol.
3. Dr. H. Abdul Fikri Faqih., M.M.

ANGGOTA :

F-PDI PERJUANGAN :

1. Dr. Hj. Rosiyati MH Thamrin, S.E., M.M., M.H.

F-P.GOLKAR :

1. Ferdiansyah, S.E., M.M.
2. H. Muhammad Nur Purnamasidi
3. Robert Joppy Kardinal, SAB

F-P.GERINDRA:

1. Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin
2. Ir. H. Nuroji

F-P.NASDEM :

1. Ratih Megasari Singkaru., M.Si.
2. Eva Stevanny Rataba, S.H.
3. Lestari Moerdijat, S.E., M.M.
4. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.MTr.

F-PKB :

1. -

F-P.DEMOKRAT :

1. -

F-PKS :

1. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T.
2. Dr. H. Fahmi Alaydroes, M.M., M.Ed.

F-PAN :

1. drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si.

F-PPP :

1. –

ANGGOTA YANG IZIN:

1. Dra. Hj Tina Nur Alam.,M.M. (F-P.Nasdem)

UNDANGAN :

1. FGPPNS Jawa Tengah (Diana Udhi H, S.Pd., M.Pd.)
2. Forum Guru Prioritas Pertama (P1) Jawa Barat (Budi Sisko Purnomo, S.P., Gr.)
3. Forum Guru Prioritas Pertama (P1) Jawa Barat (Rusli Hamzah, S.Pd.I., Gr.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF ME, S.T., M.I.Pol.):

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.41 WIB)

2021.

Jadi, sudah masuk tiga tahun sekarang. Lalu kemudian, Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Jawa Tengah (FGPPNS), serta Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI. Kebetulan hadir ada Pak Djohar dari Sumatera Utara mewakili Gerindra, Ibu Ledia dari Kota Bandung-Cimahi mewakili PKS, saya sendiri dari Demokrat, Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Pak Fikri dari PKS mewakili Tegal Pekalongan eh Tegal Brebes dan Tegal dan Brebes.

Terima kasih sekali lagi.

Izinkan, karena tadi kami baru saja selesai rapat pembiayaan pendidikan. Kita juga dapat *insight* baru rupanya dari Kemendagri tentang pembiayaan pendidikan dan anggaran yang sudah diturunkan. Nanti kita bisa diskusi lebih detail lagi di sini. Mungkin karena sifatnya ini adalah kita mendengarkan aspirasi, mungkin sementara kita sampai jam setengah lima lebih dulu, bisa disetujui?

Cukup ya?

(RAPAT: SETUJU)

Karena masih ada kereta *Whoosh* kalau jam lima itu, buat yang mau ke Bandung. Kalau ke Jawa Tengah ya memang harus nunggu kereta yang lainnya. Hari ini adalah RDPU penyampaian aspirasi tentang permasalahan pendidikan.

Dan sebagaimana kita ketahui, saya harus menceritakan sedikit bagaimana proses perjalanan konsep P3K atau juga kita pengangkatan honorer. Berawal sejak 2018, sebetulnya 2018 sudah ada itu, ya? Lalu kemudian, baru kemudian di tahun 2020, 2020, Kementerian Pendidikan membuat skema untuk pengangkatan P3K yang disepakati oleh Kementerian KemenpanRB, Kemendagri, Kemendikbud, dan mungkin kementerian lainnya yang menerima P3K.

Nah, konsepnya sederhana.

Bapak dan Ibu yang saya muliakan.

Intinya adalah kami melihat jumlah kebutuhan pendidik, termasuk juga tenaga kependidikan, maka ketahuanlah jumlah yang dibutuhkan. Dari jumlah tersebut, salah satu yang menjadi *concern* kita di Komisi X adalah masih banyak kawan-kawan honorer yang berpendapatan jauh di bawah UMR.

Bagaimana cara mendorongnya? Karena permasalahan pendidikan itu salah satunya adalah guru. Mau bikin kurikulum seperti apa pun juga kalau gurunya terbebaskan dengan berbagai permasalahan finansial ataupun yang lainnya, biasanya itu *nggak* akan jalan. Salah satu upayanya dengan membuka honorer masuk menjadi P3K.

Ditawarkanlah kurang lebih sekitar satu juta lowongan, lalu kemudian berproses. Namun, perlu diketahui bahwa proses ini bukan *domain*-nya Kementerian Pendidikan ansih. Di situ ada KemenpanRB sebagai yang melakukan panitia seleksinya, lalu kemudian juga ada juga Kemendagri yang menawarkan kepada daerah untuk menyiapkan formasi, dan ada Kementerian Keuangan yang menyiapkan alokasi anggarannya.

Mungkin Kemendikbud lebih kepada jumlah kebutuhan dan bagaimana seleksi dilakukan, apa namanya? *Assessment* dilakukan. Dalam proses perjalanannya pun kita masih terus, Komisi X mendorong agar terjadi afirmasi demi afirmasi. Sehingga yang usianya sudah di atas berapa tahun waktu itu, ya? 40 ke atas kalau *nggak* salah ya, bisa lolos. Lalu kemudian, turun lagi 35. Banyak yang sudah lolos, berdasarkan laporan Kemendikbud terakhir ke kita, kurang lebih sekitar 700.000 lebih sudah lolos.

Nah, untuk penempatan, ini mungkin kurang lebih baru sekitar 400.000-an penempatan. Masih ada sekitar, mungkin, 120.000 sampai 200.000-an lagi yang masih menunggu penempatan, karena penempatan ini sifatnya adalah usulan daerah dan karena sifatnya adalah usulan daerah, maka menunggu daerah membuka formasi.

Dalam dua tahun belakangan ini Komisi X selalu mendesak pemerintah agar pemerintah daerah membuka formasi. Karena, tanpa formasi mungkin tidak bisa diserap. Ditambah lagi, juga kami menerima banyak sekali laporan-laporan dari guru-guru yang berasal dari sekolah swasta yang kemudian akhirnya setelah lolos harus ditaruh di negeri.

Nah, ini membuat kami juga didatangi oleh perguruan-perguruan swasta yang mengatakan menginginkan gurunya dikembalikan. Jadi, permasalahan ini rupanya cukup rumit. Tapi, yang saya paling sering dengar adalah bahwa sudah lolos, tapi SK belum turun.

Nah, mudah-mudahan kawan-kawan nanti dari FGPPNS dan Forum Guru Prioritas bisa menyampaikan aspirasinya. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita jadikan bahan untuk kami nanti melaporkan kepada pemerintah bahwa ini masih banyak saudara-saudara kita yang perlu mendapatkan atensi.

Mungkin itu sebagai pembuka dari saya. Selanjutnya, kami persilakan dari, kita awali dari yang jauh dululah, Jawa Tengah untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Jawa Tengah. Setelah itu nanti baru ke Jawa Barat.

Silakan. *Monggo* Pak.

FGPPNS JAWA TENGAH (DIANA UDHI H, S.Pd., M.Pd.) :

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perkenalkan kami dari Forum P1 Swasta dan Negeri dari Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 13 Cabdin, yang masing-masing Cabdin itu ada 3-4 kabupaten. *Alhamdulillah* kami bisa kembali bisa beraudien dengan Komisi X, ini suatu hal yang sangat sangat kami terima, Pak dan apresiasi yang sangat setinggi-tingginya untuk kami bisa ketemu dengan Bapak-bapak DPR di Komisi X tentunya.

Di sini, sudah, Pak. Di sini kami akan mencoba sedikit, Pak. Sedikit perjalanan kami

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF ME, S.T., M.I.Pol.):

Sambil memperkenalkan diri, Pak, supaya kami juga bisa tahu siapa-siapa.

FGPPNS JAWA TENGAH (DIANA UDHI H, S.Pd., M.Pd.) :

Terima kasih.

Perkenalkan, nama saya Diana Udhi Hendriyanto, Bapak. Kami dari Cabdin 9, terdiri ada empat kabupaten; Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, dan Kebumen. Kemudian, kami membawa dari teman-teman kami dari masing-masing Cabdin: dari Tegal, kemudian dari Pemalang, kemudian dari Wonosobo.

Saya ini dari otomotif, Bapak, dari Wonosobo. Kemudian, sebelah kami ada Pak Adi Kurniawan. Sebelahnya lagi ada Pak Jamjuri. Kemudian, yang di belakang kami Pak Bawon dari Banjarnegara, Bapak. Ini salah satu Kepala Sekolah yang sudah dipecat, Bapak, dari Yayasan, karena mengikuti P1, harus mengundurkan diri dan sekarang beliau menjadi guru tamu di SMP. Ini salah satu sejarah yang kami inginkan untuk teman-teman P1, semoga saja di tahun ini bisa dituntaskan semuanya Pak.

Terima kasih, Bapak. Kita kembali ke awal. Kami dari Jawa Tengah, anggota kami yang aktif 1.024, Bapak. Kemudian untuk P1 di tahun 2023, sesuai dengan PMK 212, itu 6.951 Bapak, 6.951. Dan ternyata di tahun 2022-2023, Pemprov hanya membuka 1.500 Bapak, 1.500. Yang tidak dibuka paling banyak itu mapel-mapel gemuk, Bapak. Yang sampai sekarang kita tidak tahu jawabannya kenapa mapel gemuk itu tidak dibuka di tahun 2022-2023. Untuk sisa di tahun ini, itu 4.042 sesuai data yang ada di Kemendikbudristek. Kalau untuk data yang dari PMK 212, berarti masih sisa sekitar 5.000-an, 5.491 kalau *nggak* salah.

Nah kami, Bapak, berawal dari ini kami mencoba mengadu nasib kami selaku pendidik, tentunya, bahwa kami hidup di Indonesia kan tidak dibedakan antara negeri dan swasta. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak kami yang dari swasta juga banyak jadi anak-anak yang berpotensi yang baik. *Nah*, dari ini kami melihat bahwa regulasi-regulasi yang ada itu memang cenderung lebih pada ke regulasi untuk nonASN. NonASN yang dikatakan bahwa mengabdikan di instansi negeri.

Yang kami pertanyakan, Bapak, di sini kami memang mengabdikan apakah bukan di “negeri”? Padahal kita mengabdikan di swasta dan swasta itu yayasan itu berada di negeri Indonesia, bukan di negeri swasta. *Nah* dari ini, sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Bapak, “mencerdaskan kehidupan bangsa”, tentunya kami juga menuntut hak kami, yang kami di sini sudah banyak teman-teman kami yang sudah di-PHK-kan.

Sehingga untuk tuntutan kami, Bapak, yang pertama, kami meminta kejelasan kepada pemerintah bagi teman-teman kami yang sudah dikeluarkan, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Kejelasan kami bagaimana setelah kami boleh mendaftar P1? Awalnya memang semua yayasan itu mengizinkan dengan catatan akan dikembalikan lagi ke yayasan. Namun, Undang-Undang untuk DPK dicabut, tidak ada. Sehingga yayasan mungkin, tanda kutip, tertinggal oleh guru-guru yang memang dianggap mungkin kompeten.

Nah dari sini Bapak, kami yang tadi, kami menuntut kejelasan teman-teman kami P1 yang sudah dinolkan kerja, dikeluarkan dari pekerjaannya dengan dipaksakan, ada yang suruh mengundurkan diri dari tempat kerja kami. Mungkin dari lima di sini, *alhamdulillah* ada yayasan yang berpikiran baik, tidak dikeluarkan. Tapi, tetap diberikan kewenangannya untuk mendidik anak-anak di sekolah swasta. Tapi, kalau kita lihat di Jawa Tengah, Bapak, itu banyak sekali teman-teman yang sudah dikeluarkan. Hanya menyandang P1, yang sampai sekarang dari tahun 2021 kami belum mendapatkan SK.

Sehingga, kami bersikukuh membawa Pak Bawon selaku kepala sekolah yang sudah mengembangkan sekolah sampai sekian bagusnya, ternyata beliau mendaftar P1, dinyatakan lolos *passing grade* P1 dan sampai hari ini belum mendapatkan SK dan penempatan, ternyata beliau sudah dikeluarkan dari sekolah. Beliau pelakunya, Pak Bawon. Jadi kami meminta kejelasan kami P1 ini yang dari swasta itu bagaimana.

Kemudian yang kedua, Bapak. Terkait permasalahan kami di Jateng itu, memang antara Pemprov dan Pusat itu berbeda pendapat. Artinya, sesuai dengan PMK, kami harusnya dihabiskan di tahun 2023. Namun, tidak dihabiskan dan kami masih tersisa sekitar 4.042. Seperti tuntutan kami, Bapak, sampai detik ini kami juga merasa bingung antara Pemprov dan Pusat.

Kalau untuk Kurikulum Merdeka Belajar, itu menggunakan ABK 24 jam. Tetapi di Pemprov kami menggunakan ABK 28-30. Sehingga, kalau kita hitung menggunakan ABK 18-24 jam, *insyaallah* Jawa Tengah habis, Bapak. Namun, tetap menggunakan PMK, maaf ABK yang 28-30. Sehingga, untuk Jawa

Tengah mungkin, se-Indonesia, tertinggal yang paling banyak, Bapak.

Jadi harapan kami, satu mohon untuk P1 Jawa Tengah, khususnya, dan seluruh P1 yang ada di Indonesia untuk bisa diselesaikan. Kemudian juga, kami mohon pemerintah pusat untuk bisa mengawal sampai P1 tuntas, baik khusus Jawa Tengah, maupun seluruh P1 yang ada di Indonesia. Dan polemik yang terbesar adalah untuk paling banyak adalah dari Provinsi Jawa Tengah, 5.491 Bapak. Yang tahun kemarin hanya dibuka 1.500.

Sedangkan, kami beraudensi ke Kemendikbudristek, ke KemenpanRB, kemudian ke DPR RI di Komisi E Provisi Jawa Tengah, sudah dijembatani, Bapak. Dan surat sudah terkirim ke beliau, gubernur yang lama yang sudah purna, kemudian sudah bersurat ke Presiden RI melalui Komisi E yang bersurat, sampai sekarang pun belum ada kejelasan apakah nanti P1 Jawa Tengah bisa dituntaskan di tahun 2024. Harapannya, kami menyandang P1 setelah mengikuti perjalanan rekrutmen P3K dari 2021, kami belum mendapatkan SK. Jadi kami mohon, sebelum regulasi dan Juknis turun dari pemerintah, harapannya kami, satu, P1 prioritas.

Yang kedua, kami masuk dalam perekrutan yang diminta oleh KemenpanRB ataupun pemerintah pusat. Karena, kami tahu bahwa yang kami dengar hanya untuk mengutamakan teman-teman yang dari honorer, yang dari non ASN. Jadi mohon, untuk pembelajaran kita semua Bapak, kami mengabdikan di swasta, tapi dianggap kami tidak mengabdikan mungkin pada pemerintah, karena kami di sekolah swasta.

Sedangkan regulasi yang ada, pemerintah hanya mengacu pada ASN itu harapannya adalah yang mengabdikan di negeri. Jadi, kalau yang mengabdikan di negeri dianggapnya adalah mengabdikan pada pemerintah dan non ASN. Sedangkan kami mengabdikan di swasta, itu bukan mengabdikan. Dikatakan kami sebagai pekerja atau bekerja mendidik anak. Yang *insyaallah* lulusan, anak-anak kami yang swasta lebih kompeten, banyak yang kompeten dari sekolah-sekolah negeri.

Jadi kami mohon Bapak, sebelum regulasi ini turun, kami mohon untuk kejelasan status P1 kami. Kemudian, teman-teman kami yang sudah di PHK-kan untuk mendapatkan status yang jelas. Kemudian, regulasi yang ada memihak kepada kami, P1 yang sudah dikeluarkan dari sekolah dan seterusnya.

Kemudian yang terakhir Bapak, kami mohon jangan membedakan antara kami sekolah negeri dan sekolah swasta. Karena, dengan adanya perekrutan P3K, kami guru-guru negeri dan swasta yang awalnya ber-MGMP bareng Bapak, sekarang sudah sambil melihat, "wah itu guru swasta, itu guru negeri." Hampir semuanya sekarang berlomba-lomba bagaimana untuk mendapatkan SK, Bapak.

Padahal kami tetap konsentrasi untuk berjuang. Di Wonosobo ada, Bapak, SMK yang tidak pernah dibayar, tapi teman-teman tetap mengajar. Saksinya nanti ada Pak, Pak Heri, Bapak. Tidak pernah dibayar, sampai

sekarang tetap mengajar. Kalau dikeluarkan dari sekolah, nanti dikeluarkan dari Dapodik. Kalau dari Dapodik dikeluarkan, dianggapnya sudah tidak mengajar.

Dan kami juga mendengar nantinya dari BKN, yang akan terdata menjadi P3K penghabisan di tahun 2024 adalah honorer ASN, honorer yang di negeri yang terdata di BKN, sedangkan kami di swasta terdata dari mana, Bapak? Karena, kami dianggapnya orang swasta. Yang terdata di BKN adalah orang-orang yang mengabdikan di instansi negeri.

Jadi, harapannya karena kami di bawah naungan Kemendikbudristek, kami selaku guru yang terdata di Dapodik, harapannya juga masuk pada pendataan non ASN yang di BKN. Itu, Bapak, permasalahan kami yang ada di Jawa Tengah, terutama kejelasan P1 yang sudah dikeluarkan dari sekolah, kemudian status kami yang selama ini menunggu sampai sekarang tidak ada SK.

Kemudian di Jawa Tengah paling polemik Bapak, pembukaan formasinya paling kecil. Dari 6.000, hanya dibuka 1.500 dan ternyata ditinggalkan mapel-mapel gemuk, di situ ada PKWU, ada Bahasa Inggris, ada Matematika, ada Seni Budaya, itu ternyata di tahun 2003 tidak dibuka formasinya. Dan di tahun ini kami beraudiensi dengan Dindik, BKD, dan Komisi E di DPRD Provinsi, itu kalau *nggak* salah hanya dibuka 2.995, Bapak. Dari sisa, sesuai dengan data itu 4.042, tapi kalau menggunakan PMK 212, itu 5.491, Bapak.

Dan ini kami mohon dari Komisi X, bagaimana kami mengadu ke sini, nasib kami mencerdaskan anak-anak bangsa, kami tidak mau didiskriminasikan, karena kami hidup di negara Indonesia, bukan hidup di negara swasta. Swasta dan negeri berdiri di tanah air Indonesia.

Jadi sekali lagi, mohon bantuan untuk Bapak-bapak semuanya, nasib kami di sini, terutama regulasi yang belum turun sampai hari ini. Semoga regulasi bisa condong lebih kepada kita yang P1 prioritas yang sudah menunggu dari tahun 2021 sampai 2023 ini.

Dan nanti kalau tidak terdata, kita tidak tahu, Bapak. Karena, banyak teman-teman kami, sekolah-sekolah swasta yang sudah ditutup, Bapak. Dan kami mencari sekolah lagi, sulit, Bapak. Kalau kami mencari sekolah lagi, pindah ke SD/SMP, ditanya "apakah Bapak P1?" "betul P1, tidak bisa, Bapak." *Nah* ini.

Yang terakhir, Bapak. Kenapa dari pemerintah mengangkat teman-teman Prajab yang baru lulus langsung mendapatkan penempatan P3K? Sedangkan kami yang P1 saja belum tuntas. Ini juga menambah lagi permasalahan dan menambah jumlah P1 yang nanti tertinggal. Sesuai pemerintah, bahwa nanti di tahun 2024 harus tuntas semuanya.

Begitu, Bapak, permasalahan kami di Jawa Tengah. Semoga ini bisa memberikan gambaran untuk kita semuanya. Intinya kami mengadu kepada Bapak-bapak di Komisi X untuk kejelasan teman-teman kami P1 yang InsyaAllah harapan kami di tahun ini kami mendapatkan SK sesuai harapan kami semua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF ME, S.T., M.I.Pol.):

Terima kasih, Pak Diana Udhi.

Saya kurang lebih bisa menangkap. Begini, kalau kawan-kawan dari swasta ini sudah tes, lolos, tapi yang didahulukan penempatan itu yang kawan-kawan dari sekolah negeri, kira-kira gitu, ya? Kami juga belum tahu kenapa provinsi seperti itu, tetapi ada saya dengar-dengar katanya nunggu yang pensiun, bergiliran.

Tapi, kalau misalnya nunggu yang pensiun, yang masuk tetap dari yang negeri, kapan swasta masuk, kan ya? Baik, kami tampung dulu. Berikutnya, silakan dari P1 Jawa Barat, diwakili oleh Pak Budi Sisko Purnomo.

Silakan Pak.

FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA (P1) JAWA BARAT (BUDI SIKO PURNOMO, S.P., Gr.) :

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Ashadualla ilahailallah wa asyhadu anna muhammadarrasulullah,
Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa'alaalihi sayyidina muhammad,
Robbis rohlii shodrii wa yassirlii amrii wahlul uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii,
amma ba'du,*

**Yang terhormat, Pimpinan Komisi X DPR RI,
Yang terhormat, Anggota Komisi X DPR RI,
Rekan-rekan Forum P1 Jawa Barat,
Rekan-rekan FGPPNS Jawa Tengah,
Yang terhormat, Sekretariat Komisi X DPR RI dan,
Rekan-rekan media semua yang dihormati,**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wata'ala*, karena hari ini forum P1 Guru bisa beraudensi, bisa bertatap muka. Hari ini di hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, kami mewakili dari Provinsi Jawa Barat, bisa langsung bertatap muka dengan Pimpinan maupun Anggota Dewan semua.

Perkenalkan kami dari Forum Guru Jawa Barat, saya Budi Sisko Purnomo dari KCD 5. Mohon maaf, Jawa Barat itu ada kantor cabang dinasnya itu 13 KCD, jadi kami mewakili semua KCD. Bisa hadir di sini mewakili rekan-rekan semua P1 di Jawa Barat.

Nama saya Budi Sisko Purnomo dan rekan saya Pak Rusli Hamzah dari KCD XI, ada Pak Samian KCD X, Ibu Yuda dari KCD VII, terus Ibu Liana dari KCD III, Ibu Lena dari KCD XII, KCD I Ibu Urwatun dan KCD X Ibu Badria, Ibu Jenny dari KCD VI, Ibu Isma dari KCD X, Pak Hafid dari KCD VIII, Pak Asep dari KCD VII, Pak Galan dari KCD XIII, Ibu Rini dari KCD III, Pak Adit dari KCD VI, trus Pak Irfan dari KCD X.

Jadi, kami mewakili pimpinan dari Forum Guru Prioritas Pertama Jawa Barat, bersilaturahmi dengan audensi ke sini. Mohon maaf sebelumnya, karena pertama kami mengirimkan undangan via WA ke Pak Dede sama Pak Syaiful Huda, kebetulan wakil kami di Jawa Barat.

Jadi saya juga kaget Pak, sebenarnya. Karena ada Pak Danang, kebetulan langsung respon, "Pak katanya undangannya langsung hari Rabu". Itu kurang lebih 5 hari Pak, 5 hari.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF ME, S.T., M.I.Pol.):

Saya masuknya juga dari Instagram Pak, jadi itu lah fungsi cepatnya itu, Pak.

KETUA FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA (P1) JAWA BARAT (BUDI SISCO PURNOMO, S.P., Gr.) :

Saya kaget juga Pak, karena waktu itu kita pernah kirim surat Pak, resmi juga, hampir satu bulan yang lalu ke Komisi X. Cuman pas waktu saya WA, kenapa ini lebih lebih cepat ya *alhamdulillah*, syukur *alhamdulillah*, lebih cepat lebih baik gitu, Pak ya?

Kebetulan, Pak Dede sama Pak Pak Syaiful Huda wakil kita di Jawa Barat, mungkin anggota yang lain juga bisa merespon niat kami ke sini Pak, juga Jawa Tengah untuk beraudensi. Pak Fikri juga sama sebenarnya, Pak. Ada, saya kebetulan dari koordinatornya, jadi mohon maaf apabila kami tidak resmi ke sini Pak, untuk ngirim, tapi via PDF juga kebetulan Pak Danang juga menerima ada laporannya dipersilakan untuk datang audensi.

Sebenarnya P1 kita ini SMK, SMA dan SLB itu di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, jadi P1-nya itu. Kurang lebih, P1 itu hampir 1.520, sisanya itu P1 1.529. *Nggak*, se-Jawa barat, se-Jawa Barat. Kami di sini, P1-nya itu sisa dari tahun 2023 yang tahap empat. Jadi, tahun 2022 itu ada sekitar 3.800, 2023 itu ada 5.155, dan sisa yang 2024 itu 1.529. Itu mungkin apakah ada yang mengundurkan diri atau ada yang meninggal dunia, catatannya mungkin belum, tapi catatan kami yang dapat itu 1.529, sisa P1 di Jawa Barat.

Jadi, pelamar proses pertama ini adalah pelamar yang lolos *passing grade* di waktu tahun 2021. Ya, kami dari awal 2021 sampai sekarang masih semangat, Pak, menunggu ya, menunggu dan bersabar. Tahun 2024 mudah-mudahan rezeki kita bisa dituntaskan tahun ini. Kami ke para pimpinan, maupun Anggota DPR Komisi X khususnya, bisa membantu kami, bisa menuntaskan P1 di Jawa Barat ini tanpa sisa, gitu Pak.

Seperti tadi, permasalahan yang ada di Jawa Tengah sebenarnya kami sama, gitu ya. Karena P1 sebenarnya kita P1 ada swasta dan negeri. Kami tidak membedakan, yang kami permohonkan itu adalah P1-nya ini di Jawa Barat. Kita tidak membedakan swasta atau negeri. Memang ada permasalahan, tadi swasta dengan negeri saling bentrok segala macam, tapi kita di sini berbicara tentang P1 yang sudah lolos *passing grade*, gitu aja di tahun 2024 ini dituntaskan.

Jadi, guru status *passing grade* ini, seperti yang tadi disebutkan, itu belum mendapatkan formasi atau penempatan di tahun 2023. Berasal dari guru sekolah SMA, SMK negeri, dan swasta pada lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Terus, jumlah sisa formasi, yang sudah tadi di sebutkan, 1.529 orang data Disdik di Jawa Barat.

Sekarang, kondisi guru di Jawa Barat ini adalah lulus *passing grade*, P1 yang belum mendapat formasi penempatan tahun 2023 yang berasal dari guru sekolah SMA swasta di bawah naungan yayasan maupun sudah banyak, seperti yang tadi kejadian, banyak yang sudah diberhentikan/*cut off*, Dapodiknya juga sudah diberhentikan.

Jadi ya maklum Pak, Bapak dan Ibu, sebagian saya juga merasa miris ada rekan-rekan kita yang di swasta juga ada yang sudah beralih profesi, gitu Pak. Salah satu sisi, pekerjaan kita sebagai guru itu mulia di hadapan Allah *Subhanahu Wata'ala*, untuk mencerdaskan bangsa. Tapi, di satu sisi, kehidupan mereka itu, belum mungkin ya, belum diperhatikan apalagi sampai diputuskan oleh pihak yayasan, segala macam, sampai beralih profesi ke yang lain, itu kan miris.

Jadi, bukan hanya satu orang Pak yang merasa dirugikan, hanya beberapa. Tapi kan, ada keluarga, rekan-rekan itu pasti satu runtuhan, begitu. Ya jadi, kalau satu orang itu kan beruntutannya banyak, satu keluarga itu. Ya, mungkin saya juga merasa rekan-rekan semua mewakili, di sini ada aspirasi dari bawah. Mudah-mudahan, di Pimpinan dan Anggota Dewan yang lain bisa memaklumi kekhawatiran kami ini, kecemasan kami ini, apakah akan berlanjut di tahun 2024 ini.

Pada kasus kedua yang menyebabkan guru status P1 belum penempatan tersebut, seperti yang tadi, beralih profesi juga, ya kita tidak bisa membantu mungkin sepenuhnya, hanya kita bisa memberikan semangat bahwa kita berjuang di sini membawahi rekan-rekan yang ingin tuntas di tahun 2024.

Kami sebenarnya, Pak Pimpinan, sudah berapa kali ya dalam sebulan ini, kita sudah sebenarnya banyak izin Pak, ke sekolah yang kami bekerja, dari swasta maupun negeri. Sudah beraudensi ke Disdik Jabar, ke BKD juga, ke Kemendik GTK Kemendikbud, terus ke BKN dan terakhir kemarin ke KemenpanRB.

Jadi, mungkin ya kita mungkin kalau jawabannya kita tidak ini, ya ada audensi ada ininya, mungkin ada sedikit perbedaan kita tidak tahu gitu apa-apa ini permasalahannya di mana, karena regulasi belum turun. Makanya, sebelum regulasi seperti yang disebutkan oleh rekan-rekan dari Jawa Tengah itu, kita ini ingin kepastian gitu Pak, di tahun 2024 ini yang lolos *passing grade* 2021 ini benar-benar dituntaskan, gitu ya.

Bahwa Jawa Barat itu ingin, sebenarnya dari audensi dari pihak Disdik itu sebenarnya sudah ingin menuntaskan P1 ini. Jadi komitmen dari Disdik Jabar itu memang ingin menuntaskan. Tapi ingin menuntaskan itu seperti apa? Kita juga belum pasti, ya. Karena turunnya regulasi itu mungkin akan berbeda dengan yang di daerah dengan yang pusat.

Nasib guru SMA, SMK status P1 Provinsi Jawa Barat, negeri maupun swasta di antara ekspresi dan regulasi, kita menunggu kementerian terkait dalam pengadaan apa? Pengadaan seleksi di SSCASN tahun 2024 ini yang secara berkeadilan harus mengatakan penuntasan prioritas pertama, gitu.

Jadi, sebenarnya kami ke sini, maksud dan tujuannya itu ingin benar-benar tahu kejelasan bahwa P1 di Jawa Barat ini benar bisa dituntaskan gitu ya, secara khusus. Tapi umumnya mungkin seperti yang tadi dari Jawa Tengah ya, semua P1 semua gitu di Indonesia, di seluruh Indonesia. Mungkin sekitar 10.000-an, Pak ya? 10.000-an ini ingin dituntaskan. Karena ini pemasalahannya nanti akan lanjut ke, seperti yang tadi dibicarakan, ke non PNS yang ada di sekolah negeri. Itu jadi mungkin akan jadi polemik juga diantara perbedaan tersebut. Mungkin kita tidak terlalu ini ya.

Pemerintah juga, Provinsi Jawa Barat, berkomitmen untuk menuntaskan, seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa komitmen-komitmen yang ada di Disdik, di BKD memang untuk menuntaskan semua prioritas pertama. Ini regulasi yang apa, pemerintah dengan yang di Kemenpan itu belum turun, jadi kita tidak tahu Pak, apakah khawatir gitu, khawatir. Jadi, inginnya formasi di Jawa Barat itu, tahun 2024, yang 1.529 itu dibukakan formasi dan mapel-mapel yang ada itu dibukakan semua, supaya semua P1 di Jawa Barat ini bisa diakomodir, gitu Pak.

Regulasi pengadaan P3K terkait status guru P1 untuk tahun 2024, kami mohon jangan dibedakan dari regulasi sebelumnya. Sebelumnya, di tahun 2022 maupun di tahun 2023 di mana guru status P1 tersebut di tahun 2022 dan 2023 telah dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan, serta SK P3K-nya tanpa tes lagi dengan hanya daftar ulang data di akun SSCASN, serta isi dan kirim DRH, serta pemberkasan, maka mendapatkan NIP P3K.

Harapan yang kelima itu, semua guru status P1 Jawa Barat belum penempatan tahun 2023 agar mendapatkan penempatan SK P3K, SPMT, serta hak dan kewajiban di tahun anggaran 2024. Semua guru status P1 Jawa Barat belum penempatan tahun 2023, dapat memilih formasi sesuai dengan sertifikat pendidikannya, meskipun data saat tahun 2021 belum memiliki Serdik dan jurusan yang dipilih saat itu berbeda rumpun dengan Serdik yang dimiliki saat ini.

Semua guru status P1 Jawa Barat belum penempatan tahun 2023, dapat mendapatkan penempatan SK dan SPMP di tahun 2024 yang sesuai domisili agar tidak jauh dari tempat tinggal dan keluarganya. Kami guru P1 Jawa Barat sangat ingin mengabdikan pada negara ini sebagai ASN P3K di garda terdepan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendapatkan hak serta payung hukum yang lebih baik untuk kesejahteraan kehidupan guru yang lebih layak.

Kesimpulan yang kami paparkan dari awal sampai akhir, kami guru P1 Jawa Barat belum penempatan, sangat berharap Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkhusus Komisi X yang kami hormati, dapat membantu kami untuk mendorong regulasi pemerintah pusat/kementerian terkait, agar regulasi seleksi ASN P3K tahun 2024 yang dihasilkan sesuai dengan ekspektasi atau harapan kami. *Amin Ya Allah Ya Rabbal'alamin.*

Hanya kepada Allah kami semua berserah diri atas segala usaha yang telah kami maksimalkan lewat jasad kami serta doa yang merupakan ruh dari usaha kami yang dipanjatkan kepada-Nya. Allah tidak akan merubah nasib seorang suatu kaum apabila ia tidak atau ingin merubah nasibnya sendiri (Surat Ar-Ra'd: Ayat 11). Jagalah, janganlah hidup di dalam ketakutan terhadap ketidakmungkinan, hidupilah di dalam harapan baik dan optimisme terhadap yang mungkin.

Atas segala keperhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wabilahitaufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.):

Terima kasih.

Ini karena banyak ya, apakah masih ada yang mau menyampaikan?

Silakan.

FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA (P1) JAWA BARAT (RUSLI HAMZAH, S.Pd.I., Gr.):

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh,

Terima kasih atas kesempatannya, Bapak-Ibu Komisi X Anggota DPR RI, atas kesempatan saya untuk bicara.

**Yang kami hormati semuanya,
Pak Pimpinan Sidang, Haji Dede Yusuf Macan Effendi,**

Saya dari kecil itu nge-fans sama Bapak, Pak. Film Dendam-dendam Mati Membara SCTV itu, Pak. *Alhamdulillah* saya bisa bertemu dengan Bapak secara langsung. Nanti mungkin bisa foto bareng Bapak, ya. Kemudian.

**Bapak Ketua Komisi X,
Pak Haji Syaiful Huda yang saya hormati dari Fraksi PKB,
Tadi Pak Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat ya,
Kemudian Pak Fikri dari Fraksi PKS Jateng,
Tadi ada Pak Djohar Arifin dari Gerindra ya, Sumatera,
Ibu Lidia dari Kabupaten, Kota Bandung ya,**

Ya, saya ingin mempertajam, memperjelas saja dari paparan Bapak Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Jawa Barat. Jadi, ini kebetulan paparan ini yang saya yang membuatnya, gitu ya.

Jadi Bapak-Ibu, ya kami di sini mau membawa aspirasi guru-guru P1/prioritas pertama yang di dalamnya itu adalah negeri dan swasta ada, gitu kan, di Provinsi Jawa Barat, di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. *Nah*, istilah P1 sendiri, gitu kan, mungkin teman-teman atau Bapak-Ibu juga sudah tahu, gitu kan. P1 itu apa sih? Gitu kan. P1, P2, P3, gitu kan. Apa nama partai? Atau apa? Gitu kan.

Nah, P1 itu adalah istilah dari regulasi yang dibuat oleh kementerian terkait, dalam hal ini, KemenpanRB dan Kemendikbudristek. Jadi, guru P1 ini adalah, P1 itu singkatan dari prioritas pertama, yaitu guru yang statusnya lulus *passing grade* di seleksi ASN P3K tahun 2021 yang belum mendapatkan formasi atau penempatan di tahun 2023.

Jadi, di 2021 itu Kemendikbudristek, melalui Pak Nadiem, itu membuat skema ada namanya seleksi ASN P3K, di mana semua warga negara, baik yang dasarnya dia bekerja di pemerintahan negeri maupun bekerja di sekolah swasta berhak untuk mengikuti seleksi secara terbuka dan bebas, gitu ya.

Artinya, karena selama ini kan kita tahu gitu, bahwa. Saya kemarin juga dengan teman-teman ke KemenpanRB di Deputy Bidang SDM Aparatur, bahwa katanya memang kami juga di Kemenpan menyadari bahwa perekrutan tenaga-tenaga honor dari pemerintahan itu memang tidak sesuai mekanisme kami, katanya seperti itu. Mereka menyadari, gitu kan.

Ya, artinya mungkin terobosan adanya seleksi ASN P3K ini agar semua warga negara, tadi yang kata Bapak Jateng, baik *home base*-nya, asalnya, lahirnya dari rahim swasta ataupun dari rahim negeri gitu kan, dia berhak secara bebas untuk mendapatkan atau mengikuti seleksi P3K.

Ada tiga tahap saat itu 2021 itu, di mana tahap pertama itu adalah di fokuskan atau diutamakan untuk guru-guru yang ber-*home base* di negeri, berinduk di negeri, swasta tidak bisa di situ, ya. Itu memang kan aturannya seperti itu, tahap pertama. *Nah*, di tahap kedua itu, barulah ada guru swasta boleh ikut di situ. Jadi negeri dan swasta di tahap dua itu boleh ikut. *Nah*, guru negeri yang, di honorer negeri yang ketika tahap satu tidak *passing grade*, juga bisa mengikuti lagi di tahap kedua, gitu kan.

Kemudian di tahap kedua, tadi, permasalahan banyak, gitu kan. Ada guru-guru yang swasta masuk, swastanya merasa kehilangan guru terbaiknya, yang negerinya yang dalamnya merasa tergeser dan lain sebagainya, begitu kan. *Nah* kemudian, ada lagi sebenarnya di tahap tiga itu, cuman tidak terlaksana kalau tidak salah ya tahap tiga itu? Sebenarnya di tahap tiga itu, ya kami pun kan lulus *passing grade alhamdulillah* gitu kan. Cuman kan ternyata diranking, di formasi sekolah itu cuman dua, ya kita peringkat ketiga tidak dibawa, begitu kan. Sehingga, sebenarnya kami itu menunggu di tahap ketiga, tetapi tahap ketiga tidak ada, gitu kan. Kemudian teman-teman yang dari guru lulus *passing grade*, baik dari negeri swasta itu, ya beraudiensi segala macam agar bagaimana nih daripada nanti seleksi lagi. Sudah nih, yang sudah lulus *passing grade* ditempatkan, diberikan SK secara bertahap, gitu kan.

Nah kalau di Jabar sendiri, saya tadi, data di Jabar sendiri pada tahun 2021 ini, guru lulus *passing grade* ini ada sekitar 1.397 orang. Itu guru profesi Jabar itu SMA, SMK, SLB ya, bukan di kabupaten gitu kan atau kota di itu di Jabar. *Nah* kemudian, di 2022 itu ada seleksi lagi ASN P3K. Kemudian, teman-teman yang *passing grade* itu ditempatkan berdasarkan urutannya, ada 3.800 yang terserap di situ. Itu di tahap kedua berarti ya, gelombang dua, gelombang satunya yang awal, gelombang dua.

Nah, selanjutnya di 2023, Provinsi Jawa Barat itu membuka formasi 5.155 untuk jabatan fungsional guru dan itu juga melalui mekanisme P1 yang ditempatkan dengan sistem ranking, dengan prioritas satunya itu ada urutan pertama negeri, kemudian THK II ya? Eh THK II, negeri, PPG pra jabatan, dan swasta.

Kemudian, di 2024 tersisa, kalau secara hitung-hitungan, dari angka 1.397 dikurangi 3.800 dan 5.155 di 2023, maka di 2024 ini ada angkanya 1.442 di 2024, guru P1 Jabar yang belum ditempatkan. *Nah* hasil audiensi kami dengan. *Nah*, tadi kan bahwa kita ini tidak bisa berdiri sendiri, Panselnas itu ada Kemendikbud, ada KemenpanRB, ada BKN dan lain sebagainya dan kemudian, di daerah itu ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Bagaimana mendukung agar kuota formasinya ini bisa sesuai, gitu kan.

Bapak-Ibu, *alhamdulillah* rumah kami, Disdik Jabar, Disdik Provinsi Jawa Barat, di 2023 ini telah mengusulkan jumlah formasi itu sekitar 1.529, gitu ya. Kemudian, ya itu untuk mengakomodir teman-teman yang P1 di Jabar, gitu kan. Karena, komitmen dari Bu Kabid GTK Disdik Jabar sendiri, "saya mah menuntaskan P1 dulu", gitu kan ya. Ini kita belum berbicara negeri swasta. Kan, di P1 itu ada negeri dan swasta kan Pak yang telah mengikuti seleksi 2021, gitu loh.

Jadi, beresin dulu kalau mau bikin regulasi baru nanti di tahun-tahun berikutnya, barulah bikin skema seperti apa. Tapi, kami yang di P1 tersisa di Jabar sendiri 1.529 ini, mohon untuk mendapatkan hak atau nasib yang sama seperti teman-teman yang kami yang sudah penempatan, Pak.

Minggu kemarin, Rabu juga, minggu kemarin teman-teman Jabar itu sudah pada dilantik, kita hanya bengong saja melihat gitu kan, dengan teman-teman ada yang "saya korban mapel pelimpahan, mapel gemuk, PKWU, bahasa Indonesia, segala macam". Nah, saya juga sebenarnya termasuk. Saya di PKWU, walaupun yang swasta, nilai bagus begitu kan, tetapi ada skema untuk penguraian ke mapel ijazah, yaitu saya dikembalikan ke mapel ijazah biologi, begitu kan.

Karena, katanya nanti agar linearisasi dengan Serdik, agar tunjangan Bapak ke depannya bisa aman, gitu kan. Tetapi, sebenarnya ada teman saya juga yang di negeri itu, dia punya Serdik, tapi tetap di PKWU, gitu kan. Emang ada yang swasta juga, ada yang orang PKWU tapi guru kimia tapi tetap di PKWU, dapatlah karena formasinya saat itu 600 kan, saya biologi 98, saya ranking 99, di bawah gitu kan.

Nah, memang saya menyadari bahwa Panselnas atau Kementerian terkait itu memang untuk menuntaskan, dari P1 itu, guru honorer negeri dulu lah yang di P1. Saya pribadi sih tidak masalah, karena memang mereka itu *home base* negeri, gitu ya. Cuman gitu kan, ya kita juga sama sama P1 gitu kan, terseraplah. Jadi, jangan bahasa yang kemarin itu menguraikan mapel itu agar semua bisa penempatan nih sisa.

Tapi, kalau misalkan di tahun sekarang ternyata regulasinya berubah, tidak seperti tahun 2022-2023 gitu kan, yang istilahnya mendaftarkan ulang, input data lagi, data terbaru, kemudian anda apa? *Upload-upload* berkas, pemberkasan, terus dapet NIP gitu kan, baru dinyatakan ngisi DRH, dinyatakan lulus dan penempatan, gitu kan. Jadi, kami juga ingin diperlakukan sama. Apa bedanya? Kami itu P1, gitu kan, sisalah gitu kan, seperti itu. Dan kami, di sini mah saya walaupun tadi ada bahasa ya negeri dan swasta, tapi kita ini P1 semua ingin dituntaskan di tahun 2024, mendapatkan penempatan seperti teman-teman yang lain.

Ada, nah adapun nih teman-teman, mungkin teman-teman negeri sekarang ada yang nonton kita di sini, gitu kan ya. Saya juga sudah melihat di RDPU itu teman-teman, ya katanya kalau swasta jangan inilah, tidak boleh ditempatkan di negeri gitu kan. Tapi kan seleksi, namanya ASN kan di pemerintahan, kan? Ketika kemarin juga saya lihat yang dari PDI Perjuangan kan bahwa punya solusi gitu kan, bagaimana kalau guru lulus P3K di swasta di tempatnya di swasta. Ya tidak bisa kan karena undang-undangnya namanya ASN P3K itu harus ada di negeri, gitu kan.

Nah, artinya kami itu di P1 juga tidak, tidak, tidak negeri seperti ini segala macam, tidak. Kalaupun teman-teman di negeri ini ingin juga mendapatkan status P3K gitu, paling berjuanglah di daerahnya. Misalkan, tahu nih formasi, sekian formasi yang akan dibuka tahun ini, kalian teman-teman mintalah ke

Pemda-nya gitu kan untuk dibuka lagi formasi.

Jadi, ada lagi formasi baru, sehingga kita sama-sama terserap gitu kan. Walaupun tidak banyak gitu kan, ya bertahaplah gitu. Secara berkeadilan, saya ditulis di sini kan, “tolong ditempatkan kita penempatan tahun 2024 secara berkeadilan”, gitu kan. Berkeadilan itu kan, kita kan sudah, kemarin dari Kemenpan, “kita tidak mau ke depan-depannya, ini seleksi P3K itu mudah banget, hanya daftar ulang kemudian penempatan”, gitu kan.

Tapi kan, permasalahannya, kami yang sudah tes di 2021 itu loh, gitu kan. Kita ini yang sudah berkompetisi secara sehat segala macam, gitu kan. Ya sudah, bereskan, tuntaskan. Tahun depannya di 2024, abis nih misalkan P1. 2025, silakan, bagaimana mekanisme-nya agar tidak terjadi bentrok sana sinilah.

Dari saya sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata, Bapak-Ibu semua. Saya hanya manusia biasa, kepada Allah saya mohon ampun.

*Billahi fii sabililhaq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF ME, S.T., M.I.Pol.):

Ya jadi, intinya pengennya 2024 ini segera diselesaikan, ya. Kita bisa memahami tadi, Pak Guru kelihatan begitu penuh dengan perasaan emosi juga ya dalam menyampaikannya, tapi sangat wajar. Karena, saya menyimak ya, kawan-kawan swasta terutama, sudah keluar, tidak dapat gaji, tidak boleh juga mengajar di tempat lain. Menurut saya ini memang dzolim, ya. Kalau Jawa Barat, saya lihat agak lebih baik sedikit, tahun pertama terserap 3.000, lalu kemudian terserap berapa ya? Tinggal 1.500-an. Mustinya sih kalau daya serapnya per tahun 3.000-an sih, mustinya 1.500 ini bisa terserap ya.

Baik, di sini ada Pak Huda, ketua komisi, mewakili Jawa Barat juga, orang Karawang-Bekasi ini, calon gubernur. Mestinya, kita bikin aturan besok ya, calon-calon gubernur atau bupati itu harus memiliki janji dan komitmen. Benar *nggak*? Agar para honorer-honoror ini terangkat semuanya. Karena, ini kan akan terjadi di tahun ini. Karena, masih banyak yang kemarin itu, PJ-PJ, itu mengatakan, “nantu ajalah”, kira-kira. Karena, ini masih masih di apa? Pngen menyelesaikan Pilkada langsung.

Mas Nur, silakan Mas Nur. Beliau ini salah satu pejuang guru honorer dari Jawa Timur. Sudah berapa ratus ribu yang masuk, Mas Nur?

Silakan.

F-P.GOLKAR (H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI):

Ya, terima kasih Pimpinan.

Teman-teman, guru-guru yang sudah masuk P1 yang menunggu hampir

empat tahun. Saya mau ngomong apa ya? Tapi, saya mau bicara tentang pengalaman saya saja.

Jadi, memang betul, Pimpinan, jadi percepatan penyelesaian status teman-teman ini, ini lebih banyak *clear* ketika kemudian kepala daerahnya proaktif. Jawa Timur, untuk SMA/SMK, selesai sudah. Tinggal yang di bawahnya. Jember sudah tinggal 10%, tinggal yang Lumajang memang tidak kooperatif.

Jadi memang, pengalaman saya pribadi bersama dengan teman-teman, terutama yang P1 ini memang *will*-nya dari kepala daerah. Makanya, saya sepakat tadi, kalau Pimpinan, "kita perlu cari solusi itu". Karena, apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat tentunya hampir makin makin hari ya, kalau kami perhatikan, memang banyak hal yang itu menuju ke hal yang lebih baik, sesungguhnya.

Sebenarnya, menyangkut aspirasi teman-teman, menyangkut penempatan, apakah tetap di negeri, apakah kemudian dikembalikan ke swasta pun, sesungguhnya beberapa rapat di Komisi X sudah mendorong. Mulai dari kita minta terbitkan Keppres atau segala macam, itu sudah. Sampai kemudian, kita berupaya mendorong perubahan Undang-Undang ASN secara menyeluruh, walaupun kemarin baru parsial saja. Itu pun sudah kita lakukan, sesungguhnya.

Nah, jadi itu sebenarnya, pengalaman-pengalaman itu membuat saya juga putus asa. Kami ini, Komisi X juga agak putus asa juga, makanya sudah saya coba, kebetulan saya dekat dengan Gubernur Jawa Timur yang Mbakkyu saya juga, Mbak Khofifah itu. Ya, saya ajak ngobrol, "ayo Mbak, gimana caranya ini, tolong dianggar".

Karena, kita tanya ke Kementerian Keuangan, uangnya ada. Kemudian, kita tanya ke Prof. Nunu, juga dibuat aturan yang makin hari makin bisa memudahkan teman-teman untuk bisa percepatan/pengangkatan P1 untuk kemudian di diapa? Di formasi yang ada itu. *Nah* jadi, saya dan saya yakin teman-teman semua, Anggota Komisi X DPR RI, kita masih ingat janji dari Mas Menteri, janji dari Bu Dirjen, janji dari Pak Presiden, bahwa 2024 ini adalah batas terakhir bagi teman-teman untuk bisa diangkat. Karena itu, kenapa kemudian kami melarang menteri untuk membuka formasi baru, itu ada di risalah rapat, itu ada semua.

Jadi, ini mereka sudah dua tahun ke belakang, menteri ingin membuka, kita larang untuk selesaikan dulu yang P1, baru kemudian ada pengangkatan yang baru. Dan *alhamdulillah* itu masih bisa kita tahan. Karena, kita berharap 2024 ini batas akhir dari janji Mas Menteri, janjinya Bu Dirjen, termasuk janjinya Pak Presiden untuk dituntaskan.

Jadi, saya prinsip secara pribadi, karena saya juga mantan guru honorer, saya ini basis saya guru honorer, digaji Rp35.000. Jadi, saya tahu persis lah perasaan, kita semua ini sama lah. Saya punya anak dua waktu itu, cuma punya Rp35.000, bayangkan ya. Karena Tuhan, kemudian ngasih rezeki

saya dari yang lain.

Jadi *insyaallah*, apa yang teman-teman sampaikan di sini, menjadi bagian catatan yang memperkuat sebagai legitimasi kami di Komisi X untuk bisa memperjuangkan dan semoga sebelum bulan Oktober tahun 2024 ini, masalah teman-teman ini bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF ME, S.T., M.I.Pol.):

Ya, yang disampaikan Mas Nur tadi benar, ya. Saya juga pernah bicara dengan Wagub Jatim pada saat itu. Saya mendorong secara saya pribadi, saya bilang, “tolong dong diangkat kawan-kawan itu”.

Dan memang, *political will* itu atau *goodwill* daripada kepala daerah itu harus serius. Salah satunya kan, waktu itu masalah soal tunjangan yang mungkin belum siap. Saya katakan, “dibikin aja komitmen bersama dengan honorer, nanti kalau soal tunjangan itu bisa mengikuti pada saat nanti sudah ditugaskan, daripada *nggak* ditugaskan sama sekali” dan itu dilakukan. Jadi sampai sekarang saya pikir sudah berjalan baik.

Untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah, mungkin ya, mungkin karena belum ada diskusi yang intens antara kepala daerah yang apa namanya? Yang ada, jadi kelihatannya ini belum dapat atensi besar.

Pak Djohar, mungkin mau menambahkan, Pak Djohar?

F-P GERINDRA (Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN):

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan dan,
Anggota dan,
Para Pejuang Tanpa Tanda Jasa, Para Guru,**

Luar biasa, perjuangannya. *Nah*, kami dari awal sudah membahas ini, berapa tahun yang lalu. Tahun 2000, sudah sampai akhirnya. Itu ada sejuta jadinya disepakati, diangkat formasi baru dari guru honorer menjadi guru yang dibayar oleh negara dan itu makin mencarut-carut, tapi akhirnya kita bisa selesaikan. Terakhir, kita sudah sepakat dengan Menpan, dengan Menteri Keuangan untuk membuka itu dan tidak ada masalah di tingkat pusat, sebenarnya. Tadi kata Pak Nur tadi, memang tergantung *good will*-nya, kepala daerahnya. Karena, jatahnya sudah ada dan jatahnya itu tidak mencukupi kuota yang disiapkan oleh negara.

Jadi, satu juta itu tidak terpenuhi itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, bagi kita keseluruhan, di tempat kami pun seperti itu. *Nah* oleh karena ini, perlu penekanan nanti kita kepada kepala-kepala daerah. Tadi se-Jawa Timur *clear*, tempat-tempat banyak yang sudah *clear*. Barangkali, Jawa Barat sama Jawa Tengah, *nah* ini perlu ada pembicaraan khusus. Mungkin pimpinannya belum mendapatkan informasi yang utuh, ya.

Jadi, semuanya sudah selesai sebenarnya ini. Jadi, kita pun tidak lagi bicarakan itu dengan menteri, tidak lagi bicara dengan Menpan, dengan Mendikbud dan segala macam, karena kita anggap sudah selesai. Semua yang terdaftar guru honorer itu, P1, P2, P3, itu akan diangkat, asal ikut tes, karena tes itu wajib.

Awalnya, dulu kita sepakat tidak ada tes, langsung saja diangkat. Oleh Menpan, dikatakan ada undang-undangnya untuk jadi PNS itu ataupun bernegara itu harus ada tes, oke. Tapi, tesnya hanya sekedar untuk mengikuti persyaratan, itu pembicaraan kita dan tidak ada, saya katakan lagi, ulang lagi, tidak ada masalah. Karena, formasi yang disiapkan oleh pemerintah itu melebihi dari kuota yang didaftarkan untuk ikut jadi guru.

Jadi tadi ya, daerah mana-mana *clear*, ya karena bukan uang daerah, uang dari pusat. Begitu ada orangnya, langsung bisa minta permohonan pendanaannya. Itu dana dari pusat APBN, jadi bukan APBD. Jadi, sebenarnya bupati, walikota, gubernur tidak perlu khawatir. Mungkin informasi ini belum dapat mereka sepenuhnya. Ya, nanti kita bisalah nanti didiskusikan dengan Pimpinan, *insyaallah* Pimpinan akan bicarakan itu.

Saya harap semuanya sudah selesai. Saya harapkan semua Bapak-bapak ya semuanya akan diangkat, *insyaallah* pada tahun ini juga, *insyaallah*. Amin.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Djohar Arifin, dulu Ketua Umum PSSI, dulu. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF ME, S.T., M.I.Pol.):

Terima kasih, Pak Djohar.

Sumut sudah aman, ya Pak ya? Aman, ya? Baik. Pak Fikri mungkin mewakili Jateng, mewakili pemerintah Jateng.

F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):

Iya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

**Kang Dede Yusuf,
Pak Syaiful Huda,
Bapak-Ibu yang di sini,
Pak Nur Purnamasidi dan,
Prof. Djohar Arifin,
Teman-teman dari FGPNS Jawa Barat, Jawa Tengah,**

Kalau teman-teman Jawa Tengah kayaknya mungkin beberapa kali ya ketemu, juga di termasuk di daerah yang di Dapil saya, mungkin juga pernah di Rumah Aspirasi.

Kalau saya harus menyampaikan di sini, Kang Dede Yusuf, mungkin mengamplifikasi saja. Jadi, karena tadi kan 1.529 dari Jawa Barat. Kemudian, di sini masih 4.042, 4.042. Nampaknya di tempat lain sudah bisa dicicil, artinya pada penyelesaian. Jadi, mungkin teman-teman juga sudah ke Komisi E, ya? Sudah ke Komisi E. Berarti ini mudah-mudahan, ini kalau RDPU di Komisi X kan ada *live streaming*, nanti bisa dibuka lagi, bisa dikirim juga ke ke kepala dinas, mungkin juga kepada BKD untuk bersama-sama.

Tadi, dari Jawa Barat juga kayaknya bahkan BKD-nya sudah ngirim juga ke pusat, saya ininya di bahannya sudah ada. Artinya, ini mudah-mudahan legitimasi untuk kita dorong, mungkin jadi kesimpulan di Lapsing untuk supaya ditindaklanjuti di sini, jadi bola sudah di sini. Di Jawa Tengah kan belum ada ini. Mungkin juga saya ini *mention* kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mungkin ke BKD untuk menindaklanjuti, karena teman-teman sudah ke DPR, sudah ke DPRD Provinsi.

Nah artinya, supaya segera, bersama-sama dengan provinsi lain. Jadi, Provinsi Jawa Barat sudah selangkah lebih maju, di samping memang tinggal 1.500. *Nah*, ini masih 4.042, 4.042. Memang kami menyadari bahwa ada keluhan yang sama. Jadi, ini mungkin juga butuh kebijakan yang tepat. Saya kira memang tidak boleh ada yang menyingkirkan dan disingkirkan.

Jadi, kalau kemudian apa? Guru Swasta yang kemudian ikut tes, itu kan tes kan karena dibuka peluang. Jadi, bukan karena apa-apa. Karena dibuka peluang, kemudian lulus *passing*, lolos *passing grade*. Lah lantas, formasinya menunggu. *Nah*, ketika menunggu, maka ada pertimbangan. Kalau nanti dibuka semua, maka menyingkirkan apa? Guru-guru honorer yang di situ, yang ada di situ, yang ada di sekolah negeri.

Nah ini memang sesungguhnya banyak usulan juga. Saya pernah nyampaikan juga ada apa namanya? Di sebuah daerah di Indonesia ini ada pakai nota tugas, umpamanya seperti itu. Tapi, ini juga apa? Mungkin sangat terbatas, baik wilayahnya maupun juga umurnya atau panjangnya, durasinya. Tapi, banyak yang mengusulkan, kenapa? Kan masih ada celah. Sekarang saja, masih ada dosen negeri di perguruan tinggi swasta. Itu *real*, sekarang masih ada. Padahal sudah ada Undang-Undang ASN. *Nah* saya termasuk juga

dulu, tapi ini kan sebelum Undang-Undang ASN. Saya PNS, tapi ditempatkan sekolah negeri, namanya DPK, diperbantukan.

Nah konon sekarang kajiannya bahwa Undang-Undang ASN, Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tidak memungkinkan, katanya begitu. Tapi, tetap saja, saya kira, Undang-Undang ASN itu tidak ada yang mengunci mati, itu tidak ada, mesti ada. Andaikan ada kebutuhan khusus, ada perintah khusus dan atau mungkin ada problematika seperti sekarang ini, saya kira mesti tetap ada.

Jadi, saya baru baca-membaca juga beberapa usulan dari penyelenggara pendidikan swasta. Saya kira, tidak akan ada solusinya kalau tetap saja pemerintah kekeh bersikeras bahwa ASN P3K harus ditempatkan di sekolah negeri, karena namanya P3K. P3K itu Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pegawai pemerintah, bukan pegawai swasta. Pak Menteri juga di sini, Mas Menteri juga di sini menyampaikan ke Komisi X seperti itu.

Tetapi, ini berarti tidak akan ada solusi, akan selamanya seperti ini. *Nah*, toh kenyataannya Jawa Barat juga sedikit demi sedikit dicicil, ternyata bisa, masih tinggal 1.529. Dan sekarang, ini mudah-mudahan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh di Kemendikbud, mitra kami, berarti Prof. Nunu dan Mas Menteri untuk bersama dengan KemenpanRB. Karena, Jawa Barat berarti semua sudah sepakat, ini sudah dari paparannya ini ya. Berarti kan BKD sudah mengusulkan ke sini, dan angkanya 1.529.

Gimana? Tinggal regulasi dari pusat. Ini kan berarti memang sudah, berarti di provinsi sudah selesai. *Nah* ini kalau bisa sih, saya juga lewat forum ini mengimbau kepada Jawa Tengah juga demikian, sungguh pun angkanya lebih besar.

Tapi, kalau bisa sih, memang saya juga mendengarkan aspirasi dari guru negeri yang ada di, eh guru honorer yang ada di sekolah negeri. Karena, ada beberapa sekolah negeri yang mendirikan itu dia, yang mendirikan itu guru honorer itu. Guru honorer itu yang mendirikan dulu pertama. Istilah bahasa Jawanya, truko. Truko sejak awal itu mendirikan dia, sekarang akan disingkirkan. Ini kan mungkin perlu kebijakan. Tapi *nggak* perlu ada yang menyingkirkan, ada yang disingkirkan dan akhirnya antar Bapak-Ibu ini malah apa ya berbenturan. Ini kan *nggak* benar. Wong ora dibuka tes, kemudian lulus, kemudian haknya ya mendapatkan formasi dan mendapatkan penempatan atau SK, kan seperti itu mestinya.

Nah, inilah saya kira, ini saya *mention* kepada Prof. Nunu juga untuk menyeriusi, mengawal hal ini. Dan mudah-mudahan, tadi kalau harapannya 2024 ini selesai, meskipun angkanya masih besar, 4.042, dibanding dengan Jawa Barat yang 1.500. Tetap saja, mudah-mudahan kita berusaha bagaimana caranya supaya 2024 ini selesai.

Kami, saya kira Komisi X siap mengawal ini sudah, nyatanya beberapa sudah ada yang selesai. Artinya, berarti provinsi lain. Ini kan soalnya rata-rata yang kewenangan provinsi. Yang SMA, SMK, kemudian pendidikan khusus, dan lain-lain. Khusus termasuk SLB, itu juga ada. Kemarin ada juga yang SLB

juga. Bahkan, karena tidak mendapatkan ini jam, dilemparkannya guru biologi, guru matematika, dilempar ke SLB itu ngajar apa? Saya *nggak* tau juga itu. Guru SLB.

Padahal, ini kan perlu kompetensi khusus, bukan guru yang, kalau yang paling banyak PKWU ya, katanya? PKWU itu, kemudian dilempar ke SLB, ini *real* ini ada, *nah* sudah nyampaikan juga. Jadi, saya kira perlu formula. Ini sudah detail ini, sudah bukan ranahnya kebijakan politik, sebetulnya ini. Kalau sudah detail begini, mohon untuk kepada birokrat, dalam hal ini pemerintah, untuk memerinci sampai diselesaikan tuntas.

Saya kira kalau beberapa provinsi saja bisa, saya kira provinsi yang masih ada tunggakan atau masih ada masalah, saya kira mudah-mudahan bisa selesai. Begitu, Kang Dede.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF ME, S.T., M.I.Pol.):

Terima kasih, Pak Fikri.

Pak Ketua, ada masukan? Oh, Bu Ledia, Bu Ledia. Sebagai orang Bandung.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Ledia Hanifa dari PKS, daerah pemilihan Jawa Barat I, Kota Bandung, Kota Cimahi.

**Pimpinan dan,
Anggota Komisi X yang berbahagia,
Bapak-Ibu Para Guru P1 yang telah hadir di tempat ini,**

Alhamdulillah, terima kasih.

Memang, kalau kita bicara tentang pengangkatan P3K ini, seperti tidak selesai-selesai. *Nteu* beres-beresnya, nya Bu nya? Tapi, kalau kita ngomong Bahasa Sunda, nanti ada yang pakai Google Translate, jadi pakai Bahasa Indonesia aja.

Jadi, memang ini persoalan yang, sebagaimana Pak Fikri sampaikan, memang harus diselesaikan secara detail dan harus bisa mendekati pihak birokratnya yang mau melakukan penuntasan terhadap persoalan-persoalan ini. Kadang-kadang, hal-hal yang ditekuni ini bisa membuat bisa ditempatkan, pada dasarnya sebetulnya bisa demikian. Karena kan, ketika kemudian ada

formasi diajukan, berarti kondisinya, seharusnya, idealnya itu ada tempatnya, kan begitu.

Ibarat kalau main *puzzle* teh, ini tuh harus dipasang di mana, cocok *nggak* gitu, tinggal masuk masukin begitu, harusnya. Karenanya, ketika di provinsi lain banyak yang bisa kita selesaikan, mudah-mudahan dengan banyak komunikasi dengan pihak dinas. Tapi, kita juga kayaknya harus minta ini, Pak Ketua, komunikasi antara Dirjen GTK dengan Pemprov. Karena, kalau tidak dilakukan komunikasi itu, nanti tidak akan terselesaikan.

Karena, bisa membayangkan, kabupaten-kota di Jawa Tengah ada 35 ya? 35, kabupaten-kota di Jawa Barat, 27. Tentu menyisir semua yang ada. Katakanlah gini, meskipun diurus oleh provinsi, tetapi kalau SMA-nya ada di daerah kan tetap saja. Ketika datanya tidak lengkap, itu akan merumitkan dan menyulitkan.

Jadi, satu hal yang nampaknya setelah ini perlu disegerakan adalah bagaimana kita bisa melakukan pembicaraan antara pemerintah provinsi dengan GTK-nya. Kita harus, kalau saya sih berpendapatnya, Pimpinan, kalau bisa sebelum Pilkada. Nanti semua pada sibuk Pilkada, *nggak* keurus gitu.

Maksudnya, *nggak* keurusnya teh gini, sekarang kan PJ, PJ sebenarnya punya kewenangan untuk mengangkat, yang *nggak* boleh kan Plt atau Plh. Ini saja belum selesai. Nanti begitu ganti, ditetapkan lagi, mungkin dilantiknya di Januari 2025, harus mulai dari nol lagi, kayak ngisi bensin, kan repot. Mulai dari nol lagi, ya repot lagi nanti gitu.

Nah, saran saya sih mudah-mudahan Dirjen GTK bisa melakukan pembicaraan lebih cepat dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini Jawa Barat dan Jawa Tengah, supaya mereka mau mendetailkan satu persatu, menyisir satu persatu yang belum masuk dan tidak melakukan pengangkatan sebelum ini selesai, gitu. *Nah* itu, pembicaraan-pembicaraan itu menjadi bagian yang sangat penting.

Saya rasa itu, Kang. Haturnuhun.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF ME, S.T., M.I.Pol.):

Ibu Rosi apa yang mau, silakan. Ibu Rosi dari PDIP.

F-PDIP (Dr. Hj. ROSIYATI MH THAMRIN, S.E., M.M., M.H.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang terhormat, Pimpinan dan,
Teman-teman serta,
Para Guru yang sama-sama kita juga sama-sama pendidik,**

Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa bertatap muka. Saya, nama saya Rosi, tapi dari praksi PDIP dan Dapil saya itu pernah dari Papua dan Kalsel.

Saya sudah bisa rasakan masalah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Cuma, waktu saya di Komisi II, kemarin itu ada RDP dengan MenpanRB dan KASN. Itu sudah dibicarakan mengenai guru-guru dan kan ada penerimaan dua setengah juta orang itu. *Nah*, yang jelas nanti misalnya, Pimpinan Komisi, bagaimana kalau kita bisa juga mengundang KASN untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Dan teman-teman saya yang kemarin di Komisi II kebetulan Dapilnya juga banyak masalah yang kayak begini, mereka memberikan nama-nama yang artinya tertahan untuk mendapatkan SK-nya itu tadi.

Nah, itu saja mungkin saran saya. Karena, sebelum saya di Komisi X ini, ini hangat-hangatnya yang dibahas di Komisi II. Tapi, kita kemarin itu sampai tingkat dosen. Jadi, ada MenpanRB, ada KASN dan teman-teman yang ada Dapilnya, mereka langsung menyerahkan daftar-daftar yang belum diangkat dan mudah-mudahan itu bisa terselesaikan.

Mungkin itu saja saran saya. Karena, permasalahan ini bukan permasalahan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa saja. Dari Sabang sampai Merauke masalahnya ada yang seperti ini. Jadi, kalau kita memang mau membantu para guru, kita akan ada panggil yang KASN dan yang terkait, serta Mendikbud, supaya semua selesai. Karena, kalau salah satu saja, tidak akan selesai nantinya.

Itu saja, Pak Ketua. Mohon maaf lahir batin.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF ME, S.T., M.I.Pol.):

Baik. Pak Ketua, silakan masukkan.

F-PKB (H. SYAIFUL HUDA):

Terima kasih, Kang Dede.

Bapak-Ibu Guru yang saya hormati, saya banggakan,

Yang tergabung dalam forum Guru P1 Jawa Barat dan Jawa Tengah yang hadir pada kesempatan yang baik ini.

Yang pertama, kami lagi-lagi ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena untuk yang kesekian kali, Komisi X ini menerima audiensi sama dengan statusnya, guru-guru P1 statusnya di seluruh Indonesia. Saat yang sama, kita tetap harus semangat berjuang meyakinkan teman-teman di Kemendikbud.

Tentu kalau pada konteks Kemendikbud, *insyaallah* sebenarnya sudah sudah agak paham detail menyangkut soal urusan ini. Tapi, ada satu tahap lagi, yaitu harus meyakinkan teman-teman di KemenpanRB, di BKN sebagai bagian dari rekrutmen ini. Yang kira-kira, pertama Komisi X tetap akan terus berkomitmen memastikan pemerintah, menuntaskan skema yang sudah pernah dibikin oleh pemerintah sendiri dan sampai hari ini masih menyisakan beberapa hal.

Karena itu melalui forum yang baik ini, Komisi X sebagaimana dalam audiensi sebelumnya, menerima teman-teman forum Guru P1, kami ingin menguatkan lagi, akan berkirin surat lagi, bahwa skema penuntasan dari rekrutmen 1.000.000 guru honorer ini yang menyisakan beberapa hal harus dituntaskan.

Tadi Mas Pur sudah memperkuat, bahkan kita sempat meminta dimoratorium, rekrutmen ini dihentikan istilahnya, untuk menuntaskan dulu dari yang sudah lolos tapi belum mendapatkan penempatan. *Nah* karena itu, ini tetap jadi komitmen kami dan akan terus kita suarakan. Tadi saya setuju, ini harus dituntaskan sebelum peralihan pemerintahan baru. Jadi, kalau pemerintahan baru 20 Oktober, kira-kira kita berharap pemerintahan Pak Jokowi bisa nuntaskan pada medium bulan, paling lama, kira-kira Agustus-September sudah dituntaskan terkait dengan skema ini.

Yang kedua, terima kasih sekali, kami terus dapat *update* perjuangan Bapak-Ibu sekalian yang tentu sebenarnya berulang-ulang. Sebenarnya itu tidak ingin kami mendapati informasi Bapak-Ibu harus jalan ke sana kemari, termasuk audiensi pada kesempatan sore hari ini. Tapi, paling tidak akan menghilangkan dahaga, capek Bapak-Ibu ketemu Kang Dede Yusuf, paling *nggak* ya. Jadi, dinikmati saja. Karena, saya membayangkan *nggak* mudah Bapak-Ibu datang ke sini, *nggak* mudah sama sekali. Harus menyisihkan rezeki untuk datang ke sini, nyewa mobil dan seterusnya dan seterusnya.

Jadi, semoga ini termasuk menjadi bagian untuk apa? Mempercepat proses apa yang menjadi harapan Bapak-Ibu sekalian. Termasuk, saya dapat *update* dari Dinas Pendidikan di Jawa Barat. Prinsipnya, beliau berkomitmen untuk menuntaskan, itu yang penting dan itu termasuk yang saya pegang dari teman-teman Dinas Pendidikan Jawa Barat. Karena itu, kira-kira kita akan terus mengawal ini, menuntaskan. Sekali lagi, memang ini butuh komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Karena itu kami tadi, sebagaimana di sampaikan Pak Fikri, teman-teman di Jawa Tengah saya kira, tidak ada salahnya saya kira memastikan lagi komunikasi intensif dengan Dinas Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, terutama BKD-nya untuk paling tidak ada komitmen dari pihak BKD yang semangatnya dalam memproteksi Bapak-Ibu untuk dituntaskan oleh pemerintah, pengangkatan oleh pemerintah pusat.

Dengan cara ini, saya kira akan ada komunikasi yang tidak searah. Jadi, kalau Pemdanya pasif, jadi searah. Itu yang lalu akhirnya pemerintah pusat juga apa, merasa tidak, tidak perlu untuk menuntaskan secara cepat, itu tidak

boleh terjadi. Karena itu kita ingin teman-teman pemerintah daerah punya komitmen yang sama untuk menuntaskan agenda ini.

Demikian, Kang Dede. Sekali lagi, terima kasih Bapak-Ibu sekalian, *haturnuwun*. Semoga tidak lelah-lelahnya terus kita berjuang demi pendidikan kita yang terbaik ke depan.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF ME, S.T., M.I.Pol.):

Terima kasih, Ketua.

Biasanya kalau Ketua udah bicara, itu jadi fatwa. Yang jelas begini kawan-kawan semua, Komisi X sudah berkali-kali menerima permasalahan seperti ini dan sudah mendorong terus-menerus. Ada dua hal yang menjadi catatan kami, bahwa tidak boleh ada guru yang tidak mendapatkan upah ketika dia mengikuti P1 lalu menunggu sampai penempatan, nah itu yang sering terjadi.

Dia sudah lolos, tapi kemudian sambil menunggu, dia sudah ada yang keluar, ada yang tidak ditempatkan, bahkan tidak dapat upah. Itu bagi saya sesuatu yang tidak boleh terjadi. Ya walaupun menunggu, maka dia harus tetap mendapat upah. Jadi, artinya harus ada aturan bahwa dia masih boleh mengajar.

Yang kedua menurut saya, kami sudah mendesak, dalam hal ini, mitra kita ke Kemendikbud agar penempatan ASN, maaf, P3K yang sudah lolos/diterima bisa diperbantukan. Jadi, kayak Pak Fikri tadi katakan, bisa diperbantukan di swasta kembali. Artinya digaji oleh negara sebagai guru sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, tapi boleh ditempatkan di sekolah swasta. Ini akan bisa meringankan formasi. Karena, formasi ini kan hanya yang diusulkan hanya yang ada di negeri. Kalau ini bisa, maka ini akan bisa segera terserap.

Nah kemendikbud memberikan beberapa usulan, solusi. Jika pemerintah tidak bisa menempatkan, maka formasi akan ditetapkan oleh Kemendikbud. Ini sudah berkali-kali sudah disampaikan, ya. Tinggal kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Walaupun ini katanya mungkin ada Undang-Undang ASN yang dilanggar, tapi ini konsepnya adalah, apa namanya Pak Fikri, apa namanya itu? Kalau dalam keadaan darurat lah. Karena, ada sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu yang *force major*, belum ditempatkan. Jadi, kalau menurut saya itu bisa Peraturan Pemerintah atau mungkin SKB (Surat Keputusan Bersama). Ini bisa dilakukan, ini masih kami kejar.

Jadi, jangan sampai, ibaratnya, orang sudah mau nikah, sudah kirim undangan, tapi *nggak* kawin-kawin, *nggak* pernikahannya *nggak* jalan-jalan, gitu ya. Ini saya cukup prihatin. Jadi, kawan-kawan, sekali lagi, ini kami akan terus kita sampaikan kepada pihak pemerintah ya. Saya yakin nanti ini kan mudah-mudahan video ini akan jadi bukti untuk disampaikan kepada pemerintah daerah masing-masing ya.

Yang jelas, Jawa Barat, saya juga tadi *cross-check* kawan-kawan DPRD yang ada di Jawa Barat. Benar kata Pak Ketua tadi, sudah ada upaya untuk bisa menyerap di tahun 2024 ini. Kita dorong terus ya dengan kawan-kawan, terutama yang ada di provinsi ya, Kang Huda ya? Ini agar di-*push* BKD-nya agar bisa diterima. Untuk Jawa Tengah, saya pikir memang perlu pendekatan khusus. Pak Fikri perlu mendatangi Pak PJ di sana. Masih PJ, ya Pak ya? Masih PJ. Mendatangi, karena jangan sampai menunggu Pilkada, kelamaan. Kasian kawan-kawan ini sudah tidak mendapatkan gaji dan haknya. Itu yang bisa kami sampaikan.

Selanjutnya, saya akan coba bacakan kesimpulan kita hari ini.

Pertama, Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber yang telah menyampaikan paparan, masukan, saran, aspirasi mengenai guru dengan beberapa poin utama antara lain:

1. Forum Guru Prioritas Pertama (P1) Jawa Barat meminta kepada Komisi X DPR RI untuk mendorong regulasi pemerintah pusat (K/L terkait) agar regulasi seleksi ASN P3K tahun 2024 dapat sesuai harapan, di antaranya sebagai berikut:
 - a. Mendorong regulasi dari pemerintah pusat untuk memprioritaskan penuntasan guru prioritas pertama dalam seleksi ASN P3K pada jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2024.
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menuntaskan guru P1 Jawa Barat tanpa sisa sebanyak 1.529 kepada pemerintah pusat dalam pengajuan formasi di tahun 2024.
 - c. Mendorong guru P1 yang telah dinyatakan lulus agar segera ada kejelasan penempatan sesuai domisili (Dapodik), SK P3K tanpa tes kembali, cukup daftar ulang data di akun SSCASN untuk mendapatkan NIP P3K.

Jadi, *nggak* perlu dites berulang-ulang.

2. Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Jawa Tengah menyampaikan catatan tuntutan aspirasi dan rekomendasi antara lain sebagai berikut:
 - a. Mendorong adanya regulasi dan Juknis pemerintah untuk kejelasan status dan penempatan sesuai domisili (Dapodik) P1 khususnya bagi guru honorer swasta (yayasan).
 - b. Mendorong dibukanya formasi seluruh, dibuka seluruh formasi mata pelajaran dan menuntaskan P1 sebanyak 4.042 untuk Jawa Tengah pada tahun 2024.
- B. Terhadap pandangan, penjelasan, dan masukan aspirasi yang disampaikan para narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan, antara lain:
1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI, KemenpanRB RI, BKN, dan Kemendagri RI untuk melakukan moratorium pengangkatan formasi baru agar bisa menuntaskan pengangkatan P1 di tahun 2024.

2. Komisi X DPR RI mendorong Mendikbudristek RI, KemenpanRB RI, BKN, dan Kemendagri RI berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk percepatan penyelesaian pengangkatan P1 di daerahnya masing-masing di tahun 2024.
3. Komisi X DPR RI tetap berkomitmen dan memastikan komitmen pemerintah dengan melakukan pengiriman surat kepada Kemendikbudristek RI terkait rekrutmen sejuta guru agar diselesaikan sebelum peralihan pemerintahan baru.

Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini dan substansinya akan menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan Komisi X DPR RI dan pemerintah.

Silakan, ada koreksi? Ibu Ledia, Pak Nur, Pak Ketua. Cukup? Dari kawan-kawan?

FGPPNS JAWA TENGAH (DIANA UDHI H, S.Pd, M.Pd.) :

Terima kasih, Bapak, untuk waktunya.

Kami dari Jawa Tengah memang merasa kesulitan dan susah sekali untuk bisa berkomunikasi dengan Pemprov Jateng. Dimulai dari Bapak Gubernur yang sudah pensiun, kami susah sekali. Kemudian, dari Dinas Pendidikan pun agak tertutup, Bapak.

Sehingga, kami juga kesulitan apabila kami untuk beraudien, walaupun kami diterima diaudien. Namun, untuk aspirasi kami yang disampaikan, itu sampai sekarang tidak ter-cover semuanya. Jadi, kami mohon untuk bantuan dari Komisi X untuk bisa turun ke Provinsi Jawa Tengah untuk bisa memastikan atau menggandeng dari Pemprov untuk bisa melakukan penuntasan, khususnya P1 di Jawa Tengah, 4.042, Bapak.

Untuk kami dengan BKD dan Dindik, itu hampir satu bulan sampai 2-3 kali, Bapak dan tetap tertutup. Kemarin, terakhir kami ke Kemendikbudristek ketemu dengan tim data, Bapak. Kita memastikan apakah Jawa Tengah 4.042, ternyata 2.995 dan kami ketemu dengan Dindik, dengan BKD, tetap bersikukuh 2.995.

Mohon untuk Komisi X atau dari pemerintah pusat untuk turun ke Provinsi Jawa Tengah untuk bisa menggandeng Pemprov atau meluluhkan Pemprov untuk bisa merekrut P1 4.042, untuk bisa menerima SK di tahun ini. Dan walaupun memang ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk bahasanya, di DPK-kan, kami siap Bapak. Karena kami menuntut P1 dituntaskan seperti hak kami yang sudah melakukan tes di tahun 2021 dan kami menunggu sampai 2024.

Terima kasih, Bapak.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF ME, S.T., M.I.Pol.):

Di poin dua, disini sebenarnya sudah dituangkan, “meminta eh mendorong Kemendikbudristek, KemenpanRB, BKN, dan Kemendagri RI berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk percepatan penyelesaian pengangkatan”. Karena begini Pak, Komisi X tidak bisa berkirim surat kepada Pemprov, yang bisa berkirim surat itu namanya Ketua DPR.

Jadi, kalau komisi, tidak bisa berkirim surat. Kita bisa memanggil, ya kita akan tanyakan. Tapi, saya pikir poin dua ini akan kita kuatkan. Kami minggu depan akan Kunspek ke Semarang dan kami akan sampaikan juga kepada pihak pemerintah, secara langsung. Kita minta supaya ini dipercepat yang sisa yang 2000 itu.

Jadi, secara kesimpulan ini, kita mendorong beberapa kementerian tadi. Secara pribadi, nanti kami lakukan Kunspek, minggu depan kita ke Semarang, kita akan sampaikan, pasti akan ada Kepala Dinas Pendidikannya. Gitu ya? Oh minggu depannya lagi, ya? Ya, *nggak* apa-apa, minggu depannya lagi lah. Kira-kira demikian, ya.

Cukup ini? Nomor dua ya, Mas.

Baik. Dari kawan-kawan, Barat, Jawa Barat? Cukup ya? Oke, baik. Kalau begitu, kita sepakati keputusan ini.

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah, saya setiap kali ada forum guru yang meminta datang, saya deg-degan. Kenapa? Karena nanti habis provinsi ini, ada provinsi lain yang datang, ada kabupaten lain yang datang. Itu menandakan bahwa rata-rata permintaannya adalah meminta kami untuk mendorong pemerintah daerah. *Nah* kalau mendorong pemerintah daerah, sebetulnya *domain*-nya bukan di komisi X, tapi Komisi II ya Depdagri.

Tetapi, tidak apa-apa, karena guru adalah mitra kami. Kita prinsipnya kita akan *push* sama-sama, tapi tolong sampaikan juga kepada kawan-kawan, perlu motivasi ini adalah Kemendagrinya, jadi bukan Kemendikbudnya, sebetulnya adalah Kemendagrinya. Karena, tadi paparan Kemendagri sudah mengatakan alokasi dana untuk pembayaran honoronya tadi sudah ada, itu sudah diturunkan. Artinya, ada dananya. Tinggal formasinya itu apakah dipakai untuk membayar honorer yang ada atau honorer lainnya? Itu yang kita belum tahu.

Karena, kami tidak dapat *update* dari daerah terkait alokasi dana pendidikan. Jadi, kami tidak tahu, dana pendidikan kalau sudah turun ke daerah itu digunakan apa? Itu kami tidak tahu. Tadi kita baru saja paparan dengan pihak Kemendagri. Jadi, mudah-mudahan ya kita akan *push* terus di sini. Tapi, kawan-kawan boleh juga *push* juga kepada Kemendagri yang terkait mempercepat proses tiap-tiap daerah.

Itu yang bisa saya sampaikan. Saya pikir, dari kawan-kawan semua sudah semangatnya sama.

Silakan kata penutup, mungkin mewakili salah satu saja, mewakili Jawa Barat, sebagai kata penutup, *monggo*.

FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA (P1) JAWA BARAT (BUDI SSKO PURNOMO, S.P., Gr.):

Yang terhormat Pimpinan,

Terima kasih atas penerimaan untuk hari ini, kita bisa bersilaturahmi dan beraudensi, meskipun waktunya cepat. Ya, syukur *alhamdulillah* kami bisa bertemu di sini. Saya ucapkan permohonan maaf dari rekan-rekan semua ini, banyak, ada 16 orang dari perwakilan 13 KCD di Provinsi Jawa Barat, ya KCD ada 13 KCD.

Jadi, kami sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas atensi dan aspirasi kami sesuai dengan apa yang disampaikan di kesimpulan RDPU hari ini. Mudah-mudahan, harapan kami bisa terlaksana Pak, P1 Guru di Jawa Barat dan bisa menyemangati kami terus berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa memandang, tadi. Apakah swasta ataupun negeri, ya tetap guru itu adalah warga negara Indonesia yang tetap memilih hak memiliki hak yang sama di dunia pendidikan.

Cukup, ya? Cukup. Sekian, terima kasih,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF ME, S.T., M.I.Pol.):

Terima kasih, Kawan-kawan, Para Guru SMA, SMK, dan SLB yang sudah hadir.

Mudah-mudahan, kawan-kawan yang menonton dari YouTube juga bisa melihat. Silakan, nanti videonya bisa dibawa ke apa namanya? Ke dinas masing-masing agar ini kita sudah berjuang bersama-sama, ya. Bahkan tadi saya sudah minta kepada Kemendagri, sanksinya apa jika pemerintah daerah tidak menggunakan alokasi dana itu untuk, katakanlah pengangkatan honorer?

Ya, sanksinya akan diberikan sanksi tidak dikasih duitnya untuk berikutnya, itu salah satunya, ya. Jadi, cukup serius lah, kami mendesak tadi cukup serius terkait ini.

Selamat kembali, selamat pulang dan semoga permasalahan kita bisa cepat selesai. *AkhirulKalam*, kita tutup dengan membaca *hamdallah*, *alhamdulillahirrobil'amin*.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 16.15 WIB)

Terima kasih.

*Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT

ttd.

Dadang Prayitna, S.IP., M.H.
NIP. 196708061990031003